

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia Lawyers Club (ILC) awalnya adalah program acara televisi talkshow politik yang berbentuk diskusi ruang publik secara *live*. Tema-tema yang diangkat mengikuti trending topik apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, penonton televisi semakin berkurang dan berakhirnya kerjasama ILC dengan tvOne yang pada akhirnya ILC memutuskan untuk menutup siarannya di televisi. Kemudian ILC mencoba berpindah ke platform YouTube yang membuatnya semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat.

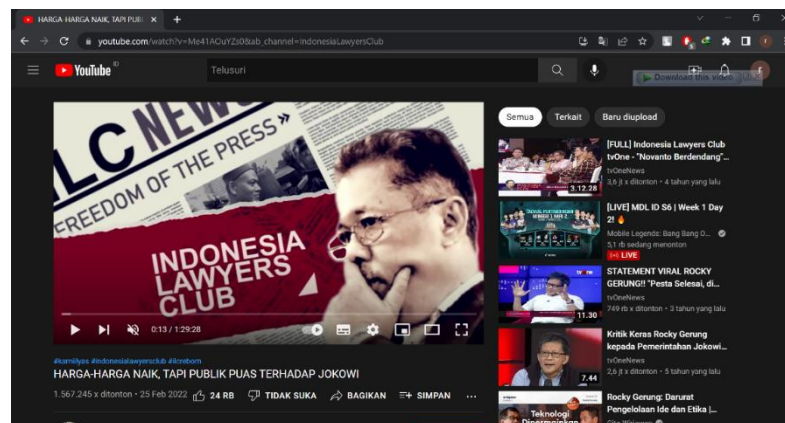
Dulunya acara ini bernama Jakarta Lawyers Club (JLC) yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Lawyers Club (ILC). Perubahan nama acara talkshow tersebut karena penikmat yang gemar akan adanya acara ini bukan hanya dari Jakarta saja melainkan seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Lawyers Club atau yang sering disebut dengan ILC yang memperbincangkan isu-isu dari berbagai persektif. Acara ini mengundang berbagai narasumber yang berkompeten dan ahli atau paham dalam suatu permasalahan tertentu. Mereka yang diundang bebas menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang

sedang dibicarakan. Acara ILC sendiri dibawakan oleh seorang wartawan senior yakni Karni Ilyas.

Konsep yang berbeda dari acara ini menggambarkan situasi debat dan diskusi, dari penyampaian pendapat yang unik dan berbeda, seringkali dalam bentuk kritik terhadap para petinggi negara, hingga memeriahkan suasana forum sehingga pencerahan bagi semua. Meskipun diskusi terkadang bisa menegangkan, selalu ada unsur hiburan, humor, dan dinamika, sehingga tepat sasaran serta tidak kaku dan tidak membosankan.

Program Indonesia Lawyers Club merupakan program yang memberikan pendidikan politik yang dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan partisipasi politik. Dari tayangan ini, ada beberapa wawasan yang dapat menambah pengetahuan para pembicara yang berbicara di forum tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman kebanyakan masyarakat selama ini adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem politik bukan urusan mereka, tetapi urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih terkecoh.



Gambar 1.1 Konten Indonesia Lawyers Club “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi (<https://www.youtube.com/watch?v=Me41AOuYZs0>). Diakses pada 8 Agustus 2022.

Dalam episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi” telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali pengguna. Hingga kini Channel Indonesia Lawyers Club telah mengunggah sebanyak 84 video, memiliki 4,81 juta pengikut di YouTube dan 331 ribu pengikut di Instagram (diakses pada 8 Agustus 2022). ILC sukses memenangkan 4 kali penghargaan Panasonic Gobel Awards tahun 2014, 2015, 2016, 2018 kategori Talkshow Berita dan 1 kali penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017 pada program Talkshow.



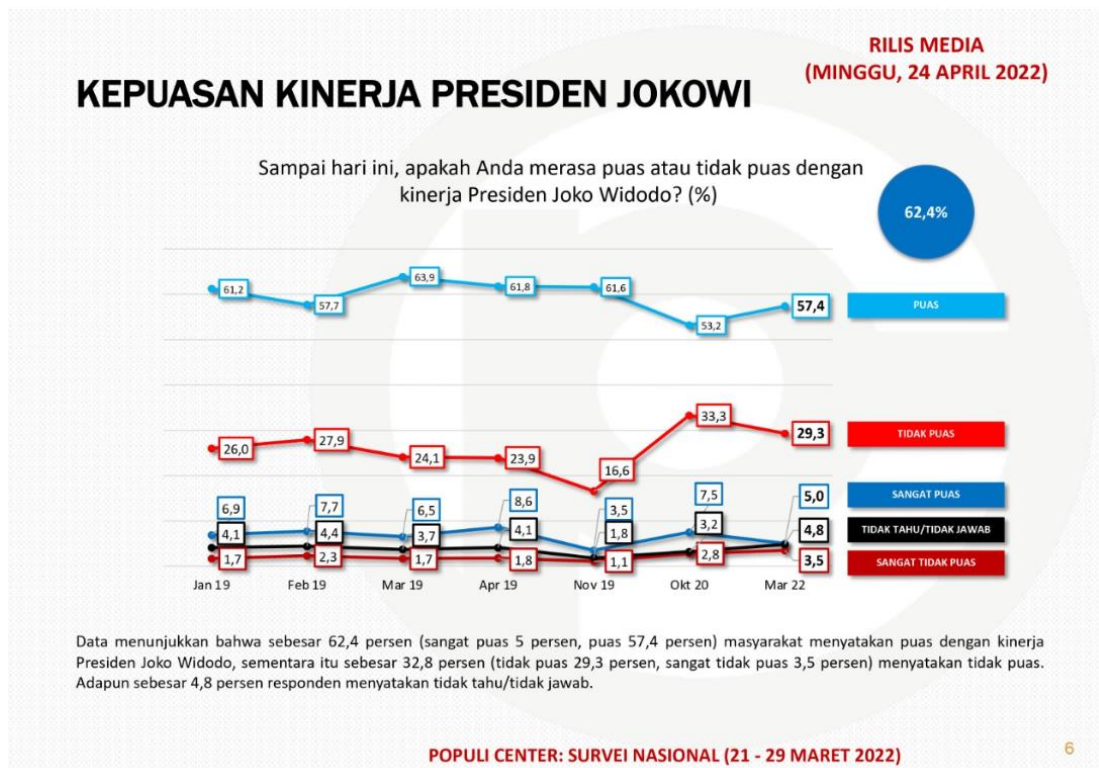
Gambar 1.2 Instagram resmi Indonesia Lawyers Club

(<https://www.instagram.com/indonesialawyersclub/>). Diakses pada 8 Agustus 2022.

Pada episode tersebut dihadiri beberapa narasumber ternama seperti Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Rocky Gerung (Pengamat Politik), Aria Bima (Politisi PDIP), Lukman Edy (Politisi PKB), Immanuel Ebenezer (Ketua Jokowi Mania), Haris Azhar (Pendiri Lokataru), dan Rizal Ramli (Ekonom Senior). Awal mula pencetus dari topik ini adalah adanya sebuah survey yang

menunjukkan bahwa sebanyak 73% masyarakat puas dan setuju terhadap kinerja Pak Jokowi saat ini, yang kemudian munculnya perdebatan menarik diantara kedua belah pihak pro dan kontra.

Tentu hal ini menjadi polemik di masyarakat sebagaimana dari survey yang telah dilaksanakan tidak adanya transparansi publik. Tidak ada kejelasan dan keterbukaan terkait siapa yang di survey, kapan yang di survey, bagaimana cara kerja survey yang tiba-tiba menghasilkan angka 73%. Akan tetapi lembaga survey Indikator Politik Indonesia mengklaim bahwa survey telah dilakukan dengan metode yang benar dan sesuai melalui daring, telepon, dan *chat*.



Gambar 1.3 Diagram hasil survei nasional yang dilakukan Populi Center

(<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-populi-menunjukkan-masyarakat-puas-atas-kinerja-presiden-jokowi>). Diakses pada 9 Agustus 2022.

Bahkan hasil survei *Populi Center* yang merupakan Survei Nasional menunjukkan angka 62,4% (sangat puas 5%, puas 57,4%) masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi, sementara itu sisanya 32,8% (tidak puas 29,3%, sangat tidak puas 3,5%) menyatakan tidak puas, serta ada sebanyak 4,8% menyatakan tidak tahu. (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-populi-menunjukkan-masyarakat-puas-atas-kinerja-presiden-jokowi> Diakses pada 9 Agustus 2022)

Dalam Pasal 7 UUD 1945 sudah tertulis “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*”. Akan tetapi Undang-Undang bisa di amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam UUD 1945 Bab II Pasal 3 ayat 1 tertulis “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*” Hal ini menjadikan bahwa meskipun semuanya telah ditetapkan dalam UUD, apapun masalahnya itu bisa terjadi kapan saja karena kedepannya tidak ada yang tahu bagaimana politik di Indonesia berjalan.

Pengamat politik dari Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempi Hadir menilai ada 2 kemungkinan yang menyebabkan munculnya wacana presiden 3 periode, yaitu adanya komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) di Jakarta dan Komite Referendum masa jabatan presiden di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat yang bersamaan Ketua Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden 3 periode didorong oleh ketakutan lingkaran penguasa

akan kehilangan kekuasaannya usai presiden saat ini lengser alias *post power syndrome*.

Dalam diskusi Syndicate Election Update ‘Wacana Presiden 3 Periode: Dari Mana Asalnya, ke Mana Arahnya?’ (Rabu, 23 Juni 2021) Wempi beranggapan Jokowi mempunyai power politik contohnya seperti anaknya, Gibran yang menjadi walikota Solo padahal sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa anaknya tidak akan terlibat dalam politik. Akan tetapi, pada akhirnya Jokowi tergoda oleh rayuan maut oleh orang-orang didekatnya untuk mendorong anaknya masuk kontestasi walikota Solo.

“Saya khawatir Jokowi tidak kuat dengan rayuan dan godaan yang dibuat oleh invisible government. Nah invisible government ini bukan parpol, tapi orang-orang yang mengendalikan kekuasaan dalam istana. Mereka punya saham politik yang menjadikan Jokowi sebagai presiden. Dengan demikian segala sesuatu bisa terjadi, perubahan UU bisa sangat terjadi karena kekuatan begitu memadai, persoalannya Jokowi mau atau tidak” ucap Wempi. (<https://voi.id/berita/61527/wacana-3-periode-presiden-dari-mana-asalnya>) Diakses pada 10 Agustus 2022.

Lucius beranggapan bahwa wacana presiden 3 periode bukan saja terjadi di era Jokowi, tetapi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah terjadi. Bahkan, wacana ini sudah muncul persis sebelum Jokowi dilantik menjadi 2 periode pada Oktober 2019 lalu. Dia tidak terlalu mengherankan wacana 3 periode ini muncul, justru yang membuatnya heran wacana ini muncul dengan sangat liar akhir-akhir ini di ruang

publik tanpa ada pernyataan resmi dari parpol, DPR, MPR, dan DPD RI. Lucius menduga tidak hanya orang per orang berpikir memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi ada banyak kelompok dengan kepentingan masing-masing yang punya agenda terkait dengan amandemen konstitusi.

“Jadi saya kira pikiran nakal di banyak tokoh yang muncul belakangan ini, itu dipelihara oleh MPR yang hingga saat ini belum jelas (sikapnya) untuk mengamandemen konstitusi mengembalikan GBHN. Saya kira sulit untuk kemudian percaya bahwa tidak ada parpol yang mengatakan rencana masa jabatan ini,” kata Lucius. (<https://voi.id/berita/61527/wacana-3-periode-presiden-dari-mana-asalnya>)

Diakses pada 10 Agustus 2022.

Selama menjabat 2 periode, Pak Jokowi berhasil menorehkan beberapa pencapaian mulai dari sektor ekonomi, industri, pembangunan, pertanian, dll. Contohnya di sektor industri manufaktur sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal ini, Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menerapkan berbagai rencana dan kebijakan strategis untuk mendorong kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selama 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, berbagai peristiwa penting global telah terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi negara, khususnya di sektor manufaktur.

Beberapa peristiwa tersebut adalah penurunan harga beberapa komoditas yang menekan ekspor Indonesia.

“Meski dihadapkan pada sekian tantangan global, sektor industri manufaktur Indonesia selama tujuh tahun pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo tetap memainkan peranan pentingnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (<https://kemenperin.go.id/artikel/22895/7-Tahun-Pemerintahan-Jokowi,-Investasi-dan-Ekspor-Industri-Kian-Bergeliat>) Diakses pada 16 Agustus 2022.

Melalui upaya dan ketangguhan para pelaku industri dalam negeri untuk menghadapi tantangan global, industri pengolahan nonmigas mampu menunjukkan kinerja yang baik. Pencapaian industri manufaktur yang impresif terlihat dari nilai investasi industri sekunder yang direalisasikan pemerintahan Jokowi pada periode pertama (tahun 2015-2019). Sementara itu, dari sisi ekspor, kontribusi manufaktur terhadap realisasi nilai ekspor negara terus mendominasi dan terus meningkat dari \$108,6 miliar pada 2015 menjadi \$127,4 miliar pada 2019.

Industri manufaktur menyumbang sekitar 75% dari total ekspor negara setiap tahun. Padahal, meski di tengah pandemi Covid-19, pada tahun pertama (2020) pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, kontribusi ekspor sektor manufaktur meningkat menjadi \$131,1 miliar. Pada tahun 2020, ekspor manufaktur menyumbang 80,3% dari ekspor negara, menghasilkan surplus perdagangan sebesar \$21,7 miliar. Surplus

perdagangan terus berlanjut hingga September 2021 sebesar \$4,37 miliar, yang merupakan 17 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Selama Januari-Agustus 2021, ekspor manufaktur mencapai \$115,13 miliar. (Kemenperin.go.id) Diakses pada 16 Agustus 2022.

Pada akhir tahun 2014 atau masa transisi, dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Presiden Jokowi, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 24,7%. Utang pemerintah di bawah Presiden Jokowi terus meningkat baik selama periode pertama dan kedua menjabat. Artinya, kenaikan utang memang terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19. Sebelum menjadi presiden RI jelang kampanye presiden, tim kampanye Jokowi sendiri sempat berpidato beberapa kali untuk mengurangi utang pemerintah. Namun alih-alih mengurangi utang pemerintah, justru terus meningkat.

Bahkan antara 2014 hingga 2019 atau periode pertama, pemerintah mencetak utang baru sebesar Rp 4.016 triliun. Utang pemerintah memang mengalami peningkatan yang sangat besar sejak Jokowi menjadi orang Indonesia pertama. Pada 2015 atau tahun pertamanya sebagai presiden Republik Indonesia, utang pemerintah di bawah Presiden Jokowi melonjak menjadi Rp 3.089 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27%. Sementara pada Januari 2017, utang pemerintah kembali melonjak menjadi Rp 3.549 triliun. Pada saat itu, rasio utang terhadap PDB adalah 28%.

Utang pemerintah terus tumbuh pesat sepanjang tahun 2017. Pada akhir tahun 2017, utang pemerintah mencapai 3.938 triliun rupiah. Rasio terhadap PDB juga menanjak menjadi 29,2 persen. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan utang pemerintah akhir tahun 2014 hingga Februari 2022, setelah dikurangi pembayaran utang dan penambahan utang baru, maka kenaikan utang pemerintah sejak Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia adalah sebesar Rp 4405,8 triliun rupiah. (<https://money.kompas.com>) Diakses pada 16 Agustus 2022.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022:

- Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun
- Total utang pemerintah tahun 2021: Rp Rp 6.908,87 triliun
- Utang pemerintah per Februari 2022: Rp 7.014,58 triliun.

Gambar 1.4 Daftar total utang Pemerintah Indonesia dari tahun 2014 - Februari 2020
(<https://money.kompas.com/read/2022/04/05/092741226/tonjakan-utang-pemerintah-sebelum-dan-setelah-jokowi-jadi-presiden-ri>). Diakses pada 16 Agustus 2022.

Melalui hasil survei nasional oleh Lembaga Survei Indonesia (Indikator Politik Indonesia) secara tatap muka periode 16-24 Juni 2022 yang dirilis pada 11 Juli 2022 menunjukkan mayoritas masyarakat merasa cukup/sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebanyak 67,5% dengan rincian 57,8% cukup puas dan 9,7% sangat puas.



Gambar 1.5 Diagram hasil Survey Indikator Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden edisi *EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH* rilisan 11 Juli 2022 (<https://indikator.co.id/publikasi/>). Diakses pada 16 Agustus 2022.

Kemudian ada banyak alasan yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi antara lain yang paling utama adalah memberi bantuan kepada rakyat kecil, membangun infrastruktur jalan, jembatan, dll, orangnya baik dan merakyat, mampu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, mengurangi kemiskinan,

penanggulangan pandemi Covid-19, memperbaiki kualitas pendidikan, dan sebagainya.

Adapun alasan masyarakat yang merasa kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi seperti harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan yang diberikan tidak merata, banyaknya pengangguran, gagal memberantas korupsi, dikendalikan oleh partai, utang negara semakin tinggi, dan lain sebagainya.



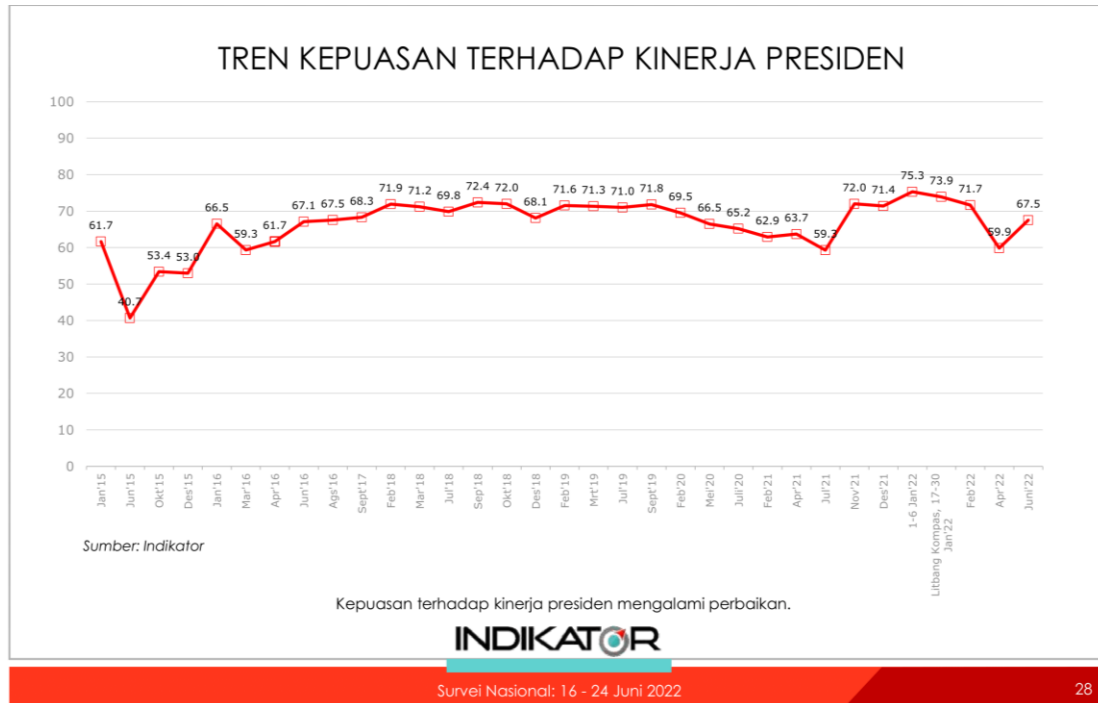
Gambar 1.6 Diagram hasil Survey Indikator Alasan Puas/Tidak Puas Atas Kinerja Presiden edisi

EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH rilis 11 Juli 2022

(<https://indikator.co.id/publikasi/>). Diakses pada 16 Agustus 2022.

Dari Januari 2015 hingga Juni 2022 selama survei ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia tercatat bahwa survei kepuasan terhadap kinerja presiden mengalami perbaikan dan beberapa peningkatan maupun stabil. Selama survei ini dilakukan

diperoleh rata-rata hasil angka yang menunjukkan diatas 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat banyak yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden Jokowi jika dibandingkan dengan yang tidak puas.



Gambar 1.7 Diagram hasil Survey Indikator Tren Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden edisi *EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH* rilis 11 Juli 2022 (<https://indikator.co.id/publikasi/>). Diakses pada 16 Agustus 2022.

Sebagai audiens sekaligus pengguna dari YouTube, masyarakat berperan sebagai khalayak media yang aktif dan memiliki kuasa penuh terhadap apa yang mereka tonton dalam hal penggunaan, menerima pesan, sekaligus memproduksi makna. YouTube sebagai bentuk media baru, yang muncul akibat dari perkembangan teknologi komunikasi, memberikan kebebasan bagi para penggunanya untuk dapat memilih konten apa yang hendak mereka konsumsi, berinteraksi dan menanggapi, serta

dapat menyesuaikan waktu yang dikehendaki penggunaanya untuk mengirim maupun menerima pesan.

Masyarakat memiliki identitas yang cukup beragam dari mulai pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Tentunya dengan keragaman tersebut juga menciptakan perbedaan kondisi sosial yang melatar belakangi setiap personalnya dalam cara mereka berfikir, bertindak, bersikap, dan memahami, utamanya ketika mengkonsumsi media. Perbedaan kondisi sosial-budaya mereka tersebut justru menciptakan keunikan dari setiap individu dalam memproduksi dan mereproduksi makna.

Oleh karena itu, setiap individu tentunya akan memiliki keunikannya masing-masing dalam menggunakan YouTube. Mulai dari bagaimana mereka menemukan dan tertarik pada konten tertentu, membentuk kebiasaan dalam mengonsumsi media, terlibat aktif dalam mencari informasi dan menanggapi, hingga membentuk persepsi dan pemaknaan yang unik dari masing-masing individu ketika mengonsumsi suatu konten.

Analisis pemaknaan sendiri merujuk pada analisis resepsi khalayak yang mengkaji tentang bagaimana proses makna diproduksi oleh audiens ketika mengonsumsi suatu media. Dengan asumsi dasar audiens sebagai khalayak aktif dengan otonomnya untuk memproduksi dan mereproduksi makna. Adapun studi ini merujuk pada konsep Stuart Hall tentang "*Encoding dan Decoding*" pada 1972.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana audiens memaknai konten Indonesia Lawyers Club baik secara pesan maupun secara konsep. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti karena sudah jelas secara tertulis menurut konstitusi bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode akan tetapi mengapa para wakil-wakil rakyat menginginkan 3 periode dan apa yang membuat publik puas terhadap Jokowi, serta ingin mengetahui bagaimana tanggapan dan pemaknaan masyarakat terkait dengan adanya wacana presiden 3 periode yang diberitakan oleh media.

Dari latar belakang diatas maka kajian studi kali ini melakukan studi audiens resepsi yang menganalisis penerimaan dan pemaknaan penonton. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan adalah penonton konten Indonesia Lawyers Club. Informan dalam penelitian ini didapatkan dengan mencari informan yang sesuai kriteria melalui fenomena, pengalaman, pengetahuan dan kecocokan yang dapat dijangkau oleh peneliti. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pemaknaan dari masyarakat, yang mana merupakan sasaran audiens dari konten Indonesia Lawyers Club. Dalam menjelaskan pemaknaan penonton, penelitian ini menggunakan kerangka teori dan resepsi audiens.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerimaan Penonton Terhadap Wacana Presiden 3 Periode Dalam Indonesia Lawyers Club Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi” di Channel YouTube Indonesia Lawyers Club?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah adalah untuk mengetahui Penerimaan Masyarakat Surabaya Terhadap Wacana Presiden 3 Periode Dalam Indonesia Lawyers Club Episode “Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada pembaca dan juga mahasiswa khususnya dalam penelitian analisis resepsi, yang kemudian dapat dikembangkan untuk membangun pemikiran para studi ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menambah produk akademis mahasiswa sehingga dapat menjadi acuan dan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian tentang pemaknaan audiens.